



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pertolonganNya, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan dalam laporan ini. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, Bappedalitbang Kabupaten Merauke berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenangnya sesuai ketentuan dimaksud.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

LAKIP merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja akuntabilitas instansi pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Merauke Nomor 134 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke, dengan susunan organisasi terdiri dari 3 Bidang dan 1 Sekretariat yang meliputi; **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan.**

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke adalah ***membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas***

Pembantuan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bappedalitbang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disajikan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappedalitbang Kabupaten Merauke dapat menjadi media informasi pertanggungjawaban kinerja dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Merauke khususnya penyelenggaraan urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Merauke, 23 Januari 2024

KEPALA BADAN,

SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut
PEMBINA TK. I
NIP. 19710306 199712 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	I - 1
B. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP	I - 2
C. Kondisi Umum Bappedalitbang	I - 3
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Tahun 2023	I - 8
E. Sistematika Penyusunan LAKIP	I - 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis Bappedalitbang 2021 – 2026	II - 1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II - 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III - 1
B. Capaian Indikator Kinerja OPD	III - 1
C. Analisis Capaian Kinerja	III - 5
D. Analisis Capaian Kinerja Anggaran	III - 10
BAB IV PENUTUP	IV - 1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. IKU Bappedalitbang	II-5
Tabel 2.2. Pengukuran Indikator Kinerja	II-7
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja dan Predikat	III-1
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Bappedalitbang	III-2
Tabel 3.3. Pengukuran Indikator Kinerja Bappedalitbang	III-4
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran 1	III-6
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sasaran 2	III-9
Tabel 3.6. Alokasi dan Realisasi Belanja	III-10
Tabel 3.7. Rincian Belanja Langsung	III-13
Tabel 3.8. Target dan Realisasi Keuangan	III-13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	I - 6

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Indikator Utama	ix
Daftar Asset	x

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke memberikan gambaran tentang kinerja pada tahun 2023, dimana LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappedalitbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LAKIP juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Bappedalitbang Kabupaten Merauke sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi **“Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara”**, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang perlu dipertanggung jawabkan secara transparan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. Pertanggung jawaban tersebut berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan sebagai bahan penilaian akuntabilitas.

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke adalah ***membantu sebagian tugas Bupati***

dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Bappedalitbang pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran belanja tahun 2023 yang digunakan untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategik, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target, dengan hasil kinerja sebesar 98,33%. Dengan harapan ke depan Bappedalitbang perlu ada review dari kegiatan-kegiatan ini agar lebih aplikatif.

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappedalitbang Kabupaten Merauke tahun 2023 ini, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

**Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(BAPPEDALITBANG)
Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir Renstra 2021-2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang tercapai	Skala Nilai Peringkat Kinerja Tabel T-E.1. Permendagri 86 Tahun 2017 (Hal 495)	%	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan inovasi perangkat daerah	(Jumlah inovasi perangkat daerah tahun n ditambah jumlah inovasi perangkat daerah tahun n-1) dibagi seluruh jumlah perangkat daerah di kali 100	%	46,15	61,54	10	10	10	10	50

REKONSILIASI ASET TAHUN 2022

SKPD/Unit Kerja : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

No Urut	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Saldo Akun 01/01/2022	Belanja Modal (LRA)	Mutasi Tambah 2022												Total Penambahan	Mutasi Kurang 2022						Total Pengurangan	Aset Tetap Perolehan 2022	Saldo Akun 31/12/2022								
						Reklasifikasi Aset Tetap Antar Belanja Modal sebelum tahun 2022 / Penilaian Aset Tanah	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Belanja Modal	Reklasifikasi Aset Tetap Ke KDP dan KDP ke Aset Tetap	Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Aset Tetap	Reklasifikasi Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap	Hutang Belanja / SP2D Tidak Terproses Tahun 2022	Aset Tetap Diterima dari SKPD Lain	Aset Tetap Belum Dicatangkan Sebelum Tahun 2022	Hibah	Belanja Modal Dana JKN	Dana BOS	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Belanja Modal		Reklasifikasi Aset Tetap Ke KDP dan KDP ke Aset Tetap	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Aset Tetap Bukan Belanja Modal	Aset Tetap Diserahkan ke SKPD Lain	Belanja Modal Bukan Aset Tetap / Ekstra Komtabel	Penghapusan Aset Tetap											
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24	25				26	27	28	29				
1	01	01	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	02		PERALATAN DAN MESIN	13.455.350.679,00	423.769.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		02	a. Alat - Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		03	b. Alat - Alat Angkutan	6.307.598.979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		04	c. Alat - Alat Bengkel & Alat Ukur	236.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		05	d. Alat - Alat Pertanian / Peternakan	-	12.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	e. Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.174.737.500,00	127.948.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	f. Alat - Alat Studio dan Komunikasi	668.543.500,00	60.707.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	g. Alat - Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	h. Alat - Alat Laboratorium	265.725.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	i. Alat - Alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	j. Alat Pensejataan	5.600.000,00	2.293.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12	k. Komputer	3.796.495.700,00	216.321.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	4.841.654.400,00	161.599.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		11	a. Bangunan Gedung	4.841.654.400,00	161.599.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12	b. Bangunan Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	472.323.300,00	98.010.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	a. Jalan dan Jembatan	249.908.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	b. Bangunan Air / Irigasi	-	59.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	c. Instalasi	222.415.000,00	29.947.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	d. Jaringan	-	8.132.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	05		ASET TETAP LAINNYA	888.942.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	a. Buku dan Perpustakaan	888.942.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18	b. Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	c. Hewan Ternak serta Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	d. Aset Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL				19.658.270.679,00	683.380.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	07		ASET LAINNYA	-	480.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		24	Aset Tidak Berwujud	-	480.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				-	480.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Merauke, 20 Januari 2023
 Pengurus Barang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan

pada setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke menyusun LAKIP Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bappedalitbang Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2023, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Merauke kepada Bupati Merauke dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Bappedalitbang untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun selanjutnya.

B. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- i. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

C. Kondisi Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Merauke Nomor 134 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke, dengan susunan organisasi terdiri dari 3 Bidang dan 1 Sekretariat yang meliputi; **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan.**

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke adalah ***membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.*** Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappedalitbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sampai dengan tahun 2023, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappedalitbang dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan intergratif antara wilayah serta lintas sektor di daerah;
2. Masih lemahnya koordinasi antara pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran SKPD, maupun dengan pemerintah Pusat, Provinsi, Distrik dan Kampung-Kampung;
3. Belum tertatanya seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah baik antara sektoral maupun perwilayahan pembangunan;
4. Belum memadainya ketersediaan data-data pembangunan Kabupaten Merauke;
5. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6. Kurangnya sumber daya manusia di bidang perencanaan.

2. Isu Strategis

Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah :

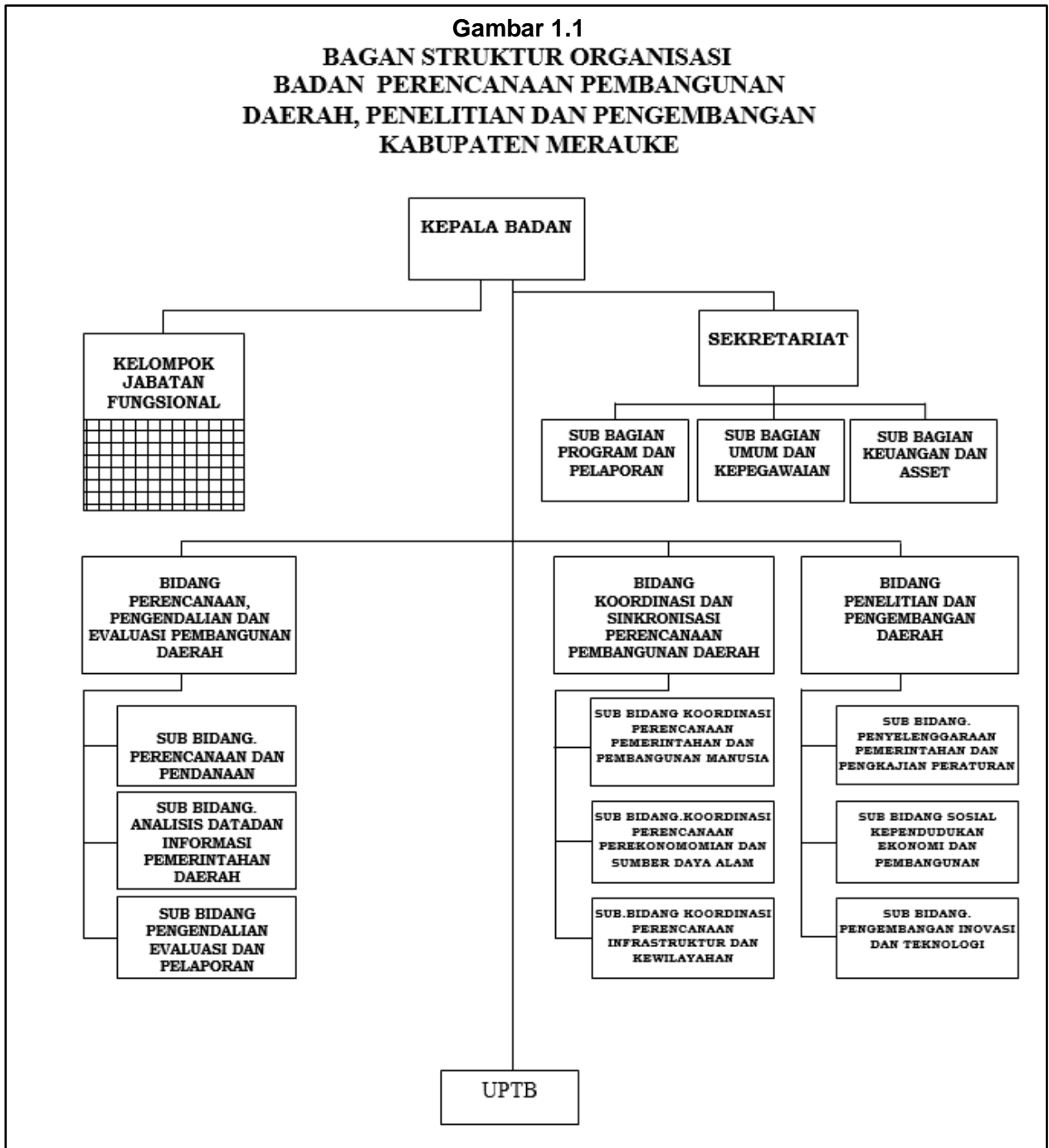
1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
2. Belum optimalnya hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
3. Belum optimalnya sumber daya manusia yang mendukung perencanaan pembangunan.
4. Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti.
5. Belum tersedianya tenaga fungsional perencanaan.

3. Struktur Organisasi Bappedalitbang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke dan Peraturan Bupati Merauke Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke terdiri dari Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan dan Asset;
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari: Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah; dan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari: Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Sub Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan; dan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mendukung kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Merauke sebanyak 40 (Empat Puluh) orang dan Tenaga Honorer sebanyak 22 (Duapuluh dua) orang dengan kondisi penempatan sesuai bidang dan tingkat pendidikan.

Jumlah PNS berdasarkan pendidikan S1 : 27 orang, D3 : 1 orang, SMA : 10 orang, SMP : 2 orang sedangkan honorer S2 : 1 orang, S1 : 11orang, SMA : 10 orang.

4. Aspek Organisasi

Kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Merauke perlu dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dalam koordinasi perencanaan pembangunan, agar hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai satuan kerja yang bertugas sebagai koordinator perencanaan pembangunan pada satuan kerja yang ada, mempunyai fungsi strategis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. Dengan jumlah satuan kerja pemerintah Kabupaten Merauke yang terdiri dari 8 bagian, 24 dinas, 7 badan dan 22 Distrik, maka potensi duplikasi program, tumpang tindihnya kegiatan sangat dimungkinkan, oleh karenanya Bappedalitbang berperan dalam koordinasi, sinkronisasi, prioritas rencana program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang yaitu:

- Tugas : membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- Fungsi : Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.Sarana dan Prasarana Pendukung

Kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu memiliki sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. TMP Trikora. Adapun prasarana yang dimiliki sebagaimana Daftar **Asset Bappedalitbang *terlampir***.

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Kinerja yang merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerjasama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan;
2. Memberi informasi perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan (realisasi fisik dan keuangan) yang dikelola oleh Bappedalitbang hambatan apa saja yang di hadapi dalam melaksanakan tugas, serta hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
4. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik tentang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke selama Tahun Anggaran 2023;
5. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran;
6. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappedalitbang kepada Kepala Daerah;
7. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan Penyelenggaraan kegiatan Bappedalitbang.

8. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappedalitbang.

E. Sistematika Penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke selama tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke tahun 2023 diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tentang gambaran umum, dasar hukum penyusunan LAKIP, kondisi umum OPD, maksud dan tujuan LAKIP 2023 serta sistematika LAKIP 2023

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Perencanaan Strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Kerangka pengukuran kinerja
- b. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- c. Analisis Capaian Kinerja
- d. Analisis Capaian Kinerja Anggaran
- Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama
2. Daftar Asset

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Bappedalitbang 2021 – 2026

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan rencana strategis perlu di tunjang dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

a. Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Merauke, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Merauke yaitu: **Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara,**

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026.

Sedangkan penjabaran dari visi dituangkan dalam misi kabupaten yang merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Pemerintah Kabupaten dan dukungan pemangku kepentingan maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan;
2. Memanfaatkan mutu sumberdaya manusia yang utuh dan inovatif;
3. Meningkatkan ekonomi rakyat yang berdaya saing berbasis pangan didukung dengan peningkatan mobilitas transportasi dan aksesibilitas infrastruktur dasar berkelanjutan;
4. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kawasan khusus, kawasan tertentu yang inovatif;
5. Memantapkan sistem demokrasi dan tata hukum yang mengakui hak – hak adat.

Berdasarkan delapan misi tersebut di atas, yang berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan Bappedalitbang Kabupaten Merauke terdapat pada misi keempat.

Misi Pertama : “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Transparan”.

b. Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, sedangkan sasaran adalah

penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Adapun tujuan Bappedalitbang BAPPEDALITBANG Kabupaten Merauke Tahun 2021- 2026 yang ingin dicapai dari misi ke-1 tersebut yang mengarah pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan adalah:

1. Meningkatkan dan menata prosedur pelayanan masyarakat secara terpadu yang transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan (Good and Clean Government), dengan sasaran pembangunan adalah:
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.
2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, yang cepat dan tepat berbasis digitalisasi sistem birokrasi, melalui penerapan e-government, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - Meningkatnya Inovasi Organisasi Pemerintah Daerah secara Digitalisasi, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan.

Sedangkan Sasaran Strategis Bappedalitbang dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu : **Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Aplikatif dan Responsif.**

c. Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan

organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian th 2022	Capaian 2023			Target 2026	Capaian sd Thn 2023 thd 2026 %
					Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kuitas perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
	Nilai Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Jumlah program RKPd yang konsisten dengan RPJMD dibagi jumlah program RKPd dikali 100	%	96,87	100	100	100	100	100
	Persentase usulan Musrenbang Distrik diakomodasi dalam RKPd	Jumlah usulan Musrenbang Distrik diakomodasi dalam RKPd dibagi jumlah usulan Musrenbang dikali 100	%	100	77	100	100	90	100
	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi berkualitas dan tepat waktu	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi berkualitas dan tepat waktu dibagi jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi dikali 100	%	100	100	100	100	100	100

	Tingkat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terlaksana dengan baik dibagi Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA terlaksana dengan baik dibagi Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dikali 100		100	100	100	100	100	100
	Tingkat Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terlaksana dengan baik dibagi Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan	presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dibagi hasil penelitian dan pengembangan dikali 100	%	200	85	100	100	100	100

	presentase inovasi yang diterapkan di daerah	jumlah inovasi yang diterapkankan dibagi jumlah inovasi yang diterapkan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

d. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Target kinerja merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Capaian 2023		Capaian Kinerja (%)	Predikat
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kuitas perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%	100	100	100	Sangat berhasil
	Nilai Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD yang konsisten dengan RPJMD dibagi jumlah program RKPD dikali 100	%	100	100	100	Sangat berhasil

	Persentase usulan Musrenbang Distrik diakomodasi dalam RKPD	Jumlah usulan Musrenbang Distrik diakomodasi dalam RKPD dibagi jumlah usulan Musrenbang dikali 100	%	77	100	100	Sangat berhasil
	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi berkualitas dan tepat waktu	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi berkualitas dan tepat waktu dibagi jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi dikali 100	%	100	100	100	Sangat berhasil
	Tingkat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terlaksana dengan baik dibagi Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikali 100	%	100	100	100	Sangat berhasil

	Tingkat Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA terlaksana dengan baik dibagi Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dikali 100	%	100	100	100	Sangat berhasil
	Tingkat Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terlaksana dengan baik dibagi Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100	%	100	100	100	Sangat berhasil

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Bappedalitbang tahun 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut**
NIP : 19710306-199712 1 001
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ROMANUS MBARAKA**
Jabatan : Bupati Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 10 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI MERAUKE

ROMANUS MBARAKA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE

SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut
NIP. 19710306 199712 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai SVAIP Bappeda Litbang	8
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%
3	Meningkatnya Peran Perangkat Daerah Dalam Inovasi Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Inovasi Perangkat Daerah	10%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
5 1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11.329.955.742
5 1 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 8.670.437.595
5 1 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGINISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 3.385.285.650
5 5 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 2.681.717.296
TOTAL		Rp. 23.767.396.237



Merauke, 10 Januari 2023

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE

S. Panjaya
SAMUEL BRINDO TAHIYA, S.Hut
NIP. 19710306 199712 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LEON ADRIAN GEBZE,S.IP**
NIP : 19850510 200701 1 001
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut**
NIP : 19710306 199712 1 001
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE**

**SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut
NIP. 19710306 199712 1 001**

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE**

**LEON ADRIAN GEBZE,S.IP
NIP. 19850510 200701 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE

NO	BASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas pemerintahan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai SAPP Sapseds Litsbang	8

KODE PEKERJAWA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
5	01	91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKROTA	Rp. 11.029.855.742
6	01	01	2.01 Pemeliharaan, Penganggaran, dan Swakelola Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 100.570.000
5	01	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.161.421.180
5	01	01	2.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 100.581.000
6	01	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.870.520.950
9	01	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 17.680.000
9	01	01	2.08 Penyediaan Jasa Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.235.958.712
9	01	01	2.09 Penambahan Barang Milik Daerah Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 291.769.000
TOTAL				Rp. 11.029.855.742

KEPALA BAPPEDA LITSBANG
 KABUPATEN MERAUKE



SARUJI SARDI YAHYA, S.H.,
 NIP. 19710306 199712 1 001

Merauke, 12 Januari 2023
 SEKRETARIS BAPPEDA LITSBANG
 KABUPATEN MERAUKE



LEONARDUS GUNAS, S.P., M.Si
 NIP. 20090410 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KATRINA MINGGU,S.Sos**
NIP : 19720103 199712 2 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **LEON ADRIAN GEBZE,S.IP**
NIP : 19850510 200701 1 001
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE**

**LEON ADRIAN GEBZE,S.IP
NIP. 19850510 200701 1 001**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
DAN KEPEGAWAIAN**

**KATRINA MINGGU,S.Sos
NIP. 19710103 199712 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai SKUP Berpeda Ciptang	0

KODE REVENUE		PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER BANGUNAN
8	1 01	PROSEDUR PENYUSUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE	Rp. 5.715.488.543				DAU
5	41 01 3 03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 180.261.200				DAU
6	1 01 3 04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kepegawaian	Rp. 76.443.000	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta atribut kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut kepegawaian	Kapas	DAU
6	1 01 3 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 111.000.000	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	DAU
6	1 01 3 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.875.820.800				DAU
8	1 01 3 08 01	Penyediaan Kumpulan Indeks Lembar Kerja/Berkas Berupa Kartu	Rp. 8.022.100	Tersedianya Kumpulan Indeks Lembar Kerja/Berkas Berupa Kartu	Jumlah Paket Kumpulan Indeks Lembar Kerja/Berkas Berupa Kartu yang Disediakan	Kapas	DAU
6	1 01 3 09 02	Penyediaan Pakaian dan Peralengkapan Kantor	Rp. 241.751.900	Tersedianya Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Pakaian dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Kapas	DAU
6	1 01 3 09 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 305.120.000	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kapas	DAU
6	1 01 3 09 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Rp. 80.000.000	Tersedianya Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	Kapas	DAU
6	1 01 3 09 06	Penyediaan Bahan Bakar dan Peralatan Perukung-undangan	Rp. 16.000.000	Tersedianya Bahan Bakar dan Peralatan Perukung-undangan	Jumlah Cakupan Bahan Bakar dan Peralatan Perukung-undangan yang Disediakan	Orongan	DAU
6	1 01 3 09 08	Fasilitas Keperluan Tulis	Rp. 70.000.000	Tersedianya Fasilitas Keperluan Tulis	Jumlah Lembar Kertas Keperluan Tulis	Lembar	DAU
6	1 01 3 09 09	Pengembangan Rapor Kinerja dan Perilaku BKR	Rp. 1.180.400.000	Tersedianya Pengembangan Rapor Kinerja dan Perilaku BKR	Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Kinerja dan Perilaku BKR	Laporan	DAU
6	1 01 3 09 10	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 17.849.000				DAU
6	1 01 3 09 11	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 30.000.000	Tersedianya Lembar Kerja	Jumlah Paket Lembar Kerja yang Disediakan	Oron	DAU
6	1 01 3 09 12	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 41.850.000	Tersedianya Lembar Kerja dan Meja Kerja	Jumlah Lembar Kerja dan Meja Kerja yang Disediakan	Oron	DAU
6	1 01 3 09 13	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 1.236.918.712				DAU
6	1 01 3 09 14	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 4.994.500	Tersedianya Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Lembar Kerja Perangkat Daerah yang Disediakan	Lembar	DAU
6	1 01 3 09 15	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 300.000.000	Tersedianya Lembar Kerja dan Meja Kerja	Jumlah Lembar Kerja dan Meja Kerja yang Disediakan	Lembar	DAU
6	1 01 3 09 16	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 900.000.000	Tersedianya Lembar Kerja dan Meja Kerja	Jumlah Lembar Kerja dan Meja Kerja yang Disediakan	Lembar	DAU
6	1 01 3 09 17	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 99.179.000				DAU
6	1 01 3 09 18	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 128.880.000	Tersedianya Lembar Kerja dan Meja Kerja	Jumlah Lembar Kerja dan Meja Kerja yang Disediakan	Lembar	DAU
6	1 01 3 09 19	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 40.000.000	Tersedianya Lembar Kerja dan Meja Kerja	Jumlah Lembar Kerja dan Meja Kerja yang Disediakan	Lembar	DAU
6	1 01 3 09 20	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 104.000.000	Tersedianya Lembar Kerja dan Meja Kerja	Jumlah Lembar Kerja dan Meja Kerja yang Disediakan	Lembar	DAU
6	1 01 3 09 21	Pengembangan Lembar Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp. 44.000.000	Tersedianya Lembar Kerja dan Meja Kerja	Jumlah Lembar Kerja dan Meja Kerja yang Disediakan	Lembar	DAU


 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 LUCY ANTONI BEBEY, S.P.A.M.S
 NIP. 196001020070110001

Merauke, 18 Januari 2023
 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN MERAUKE

 KATULLA WINDA SARI
 NIP. 196201011991210001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELLEN CHRISTINA JUNINDRA,S.Kel**
NIP : 19770612 200501 2 017
Jabatan : Kepala Sub Bagian Progam dan Pelaporan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **LEON ADRIAN GEBZE,S.IP**
NIP : 19850510 200701 1 001
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
**SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE**

LEON ADRIAN GEBZE,S.IP
NIP. 19850510 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
**KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
PELAPORAN**

ELLEN CHRISTINA JUNINDRA,S.Kel
NIP. 19770612 200501 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja DPD apa saja yang akan dicapai	Rasio GAKIP Terhadap Laporan	3

KODE REKIBING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KINDLIA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA
6 1 01	PROGRAM PENALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKITTA	102.376.886				
6 1 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 102.376.886				
6 1 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 10.500.000	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DNU
6 1 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.300.000	Terselenggaranya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	DNU
6 1 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 4.300.000	Terselenggaranya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	DNU
6 1 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 79.476.886	Terselenggaranya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	DNU
6 1 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.500.000	Terselenggaranya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	DNU


 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
 KABUPATEN MERAUKE
 LUKMAN GEORGE, S.KP.M.Si
 NIP. 746212 20031 1 001

MERAUKE, 19 Januari 2022
 KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN MERAUKE

 ELLEN CHRISTINA JABERA, S.KW
 NIP. 19710612 200801 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOHANA NOYA,S.Sos**
NIP : **19850115 201501 2 001**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **LEON ADRIAN GEBZE,S.IP**
NIP : **19850510 200701 1 001**
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE

LEON ADRIAN GEBZE,S.IP
NIP. 19850510 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET

YOHANA NOYA,S.Sos
NIP. 19850115 201501 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR RISIKO	TUNGGU
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja OPD agar sesuai dengan standar	Risk SAKIP Support Litbang	B

KODE REKEMNG	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA
9 1 01	PROGRAM PENGUMUMAN LURAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.183.821.188				
9 1 01 2 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.183.821.188				
0 1 01 2 00 0 1	- Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.692.861.180	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/orang	DAU
9 1 01 2 00 0 2	- Pemeliharaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 496.768.000	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	DAU
0 1 01 2 00 0 3	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 10.000.000	Terselenggaranya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	DAU
0 1 01 2 00 0 4	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Rp. 3.300.000	Terselenggaranya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	DAU


 SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN MERAUKE

 LEONARDUS GODELE, S.P., M.Si
 NIP. 1968010 200701 1 091

Merauke, 19 Januari 2023
 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN MERAUKE


 YOHANA NOYA, S. Drs
 NIP. 1980118 201801 2 091



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUSTY, S.TP**
NIP : **19750818 200801 2 017**
Jabatan : Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut**
NIP : **19710306 199712 1 001**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE**


**SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut
NIP. 19710306 199712 1 001**

PIHAK PERTAMA

**KABID KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**


**GUSTY, S.TP
NIP. 19750818 200801 2 017**

PERUSAHAAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN SINERGI/ASAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BERAUK

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana	100%

NO	KODE PERENCANAAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	KUALITAS KINERJA	INDIKATOR SUB-KINERJA	SIFAT	SIMPULAN
4	1 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Perencanaan Daerah	Rp. 4.800.000.000				
4	1 01 001	Konstruksi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 1.000.000.000				
4	1 01 001 01	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 310.000.000	Terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 001 02	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 690.000.000	Terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	392
4	1 01 002	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 240.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	361
4	1 01 002 01	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 1.200.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	675/2
4	1 01 002 02	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 120.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 002 03	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 240.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 002 04	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 174.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	361
4	1 01 002 05	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 60.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 002 06	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 60.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 002 07	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 60.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 002 08	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 240.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 002 09	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 240.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242
4	1 01 002 10	Kontribusi Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bidang Perencanaan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Rp. 240.000.000	Terpenuhi	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	100%	242

KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN SINERGI/ASAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 MARIYATI, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 1963081198111001

KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN SINERGI/ASAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 NIP. 1963081198111001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CORNELIA M. M NDIKEN,S.IP**
NIP : 19810531 200012 2 002
Jabatan : Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **G U S T Y , S.TP**
NIP : **19750818 200801 2 017**
Jabatan : Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

G U S T Y , S.TP
NIP. 19750818 200801 2 017

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI
PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**

CORNELIA M. M NDIKEN,S.IP
NIP. 19810531 200012 2 002

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	DESKRIPSI STRATEGIS	INDIKATOR-KINERJA	TARGET
1	Strategis Sub Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah yang Tersebut	Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Tersebut	100%

KODE BUDGET	PROGRAM-KEGIATAN	ANALISIS	URUTAN DOKUMEN	INDIKATOR KUALITAS	SATUAN	BILANGAN
01-1-01-001	PROGRAM KOPERASI DAN SIMPOMAN PENGALIHAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp				
01-1-01-001-01	Kontribusi Masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.644.175.000				
01-1-01-001-01-01	Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	Rp. 210.434.000	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Masyarakat (RUPM, RUPK, RUPD, RUPK, RUPD, RUPK)	Dokumen	100%
01-1-01-001-01-02	Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	Rp. 177.500.000	Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Masyarakat	Laporan	100%
01-1-01-001-01-03	Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	Rp. 256.241.000	Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Masyarakat	Laporan	100%
01-1-01-001-01-04	Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	Rp. 1.000.000.000	Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Masyarakat	Laporan	100%

KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
 BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN MERAUKE

 01-1-01-001
 01-1-01-001-001

KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
 BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN MERAUKE

 01-1-01-001
 01-1-01-001-001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BENI JAYA LAKSANA, S.STP, M.Tr.I.P**
NIP : 19821126 200412 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **GUSTY, S.TP**
NIP : **19750818 200801 2 017**
Jabatan : Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
**KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

GUSTY, S.TP
NIP. 19750818 200801 2 017

PIHAK PERTAMA
**KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI
PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBERDAYA ALAM**

BENI JAYA LAKSANA, S.STP, M.Tr.I.P
NIP. 19821126 200412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KABUPATEN MERANGIN**

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Teknis serta Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah yang Terukur	100%

KODE BUDGET	KODE KEMENTERIAN	KODE AGENSI	KODE SUB AGENSI	KODE PROGRAM	KODE SUB PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	KODE BUDGET	
								1	2
9	01	01							
4	01	01	001						
5	1	01	001	001					
6	1	01	001	001	001				
9	1	01	001	001	001	001			

1	2	3	4	5	6	7
	PERENCANAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PERBANGUNAN DAERAH	Rp. 191.475.000				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 191.475.000				
	Asas dan Prinsip (Dasar-Dasar) Perencanaan Pembangunan Persepsi Daerah yang Berkeadilan	Rp. 338.000.000	Terdapatnya Perencanaan (Dasar Perencanaan) Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan (DPRD) dan (DPRD) dan (DPRD)	Asas dan Prinsip (Dasar-Dasar) Perencanaan yang Berkeadilan Perencanaan (DPRD) dan (DPRD) dan (DPRD)	Eksternal	(D)
	Koordinasi Perencanaan (Dasar-Dasar) Perencanaan Persepsi Daerah yang Berkeadilan	Rp. 344.121.200	Terdapatnya Perencanaan (Dasar Perencanaan) Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan (DPRD) dan (DPRD) dan (DPRD)	Asas dan Prinsip (Dasar-Dasar) Perencanaan yang Berkeadilan Perencanaan (DPRD) dan (DPRD) dan (DPRD)	Internal	(D)
	Asas dan Prinsip (Dasar-Dasar) Perencanaan Pembangunan Persepsi Daerah yang Berkeadilan	Rp. 344.121.200	Terdapatnya Perencanaan (Dasar Perencanaan) Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan (DPRD) dan (DPRD) dan (DPRD)	Asas dan Prinsip (Dasar-Dasar) Perencanaan yang Berkeadilan Perencanaan (DPRD) dan (DPRD) dan (DPRD)	Internal	(D)

KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KABUPATEN MERANGIN



KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KABUPATEN MERANGIN

KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KABUPATEN MERANGIN



KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KABUPATEN MERANGIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMUEL, ST**
NIP : 19780911 201004 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **GUSTY, S.TP**
NIP : **19750818 200801 2 017**
Jabatan : Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

GUSTY, S.TP
NIP. 19750818 200801 2 017

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

SAMUEL, ST
NIP. 19780911 201004 1 001

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEMILAYAHAN
PADA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMERANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	DESKRIPSI STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyempurnakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merauke dan Kabupaten Merauke	Persentase Kerja Pembangunan Daerah yang Terealisasi	100%

KODE REKONSILIASI	INSTRUMEN LEGISLATIF	ANGGARAN	KINDERA SUB KENDERA	SOBAYA SUB KENDERA	DEKORASI	DEKORASI PAWA
1						
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

**KEPALA BIDANG DAN COORDINATOR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SATELIT (MARAUDAS)**



MERAUKE, 15 FEBRUARI 2023

**KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEMILAYAHAN
PADA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMERANGAN**



MERAUKE, 15 FEBRUARI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax: (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP**

NIP : 19800323 200312 1 008

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut**

NIP : 19710306 199712 1 001

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE**

**SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut
NIP. 19710306 199712 1 001**

PIHAK PERTAMA

**KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP
NIP. 19800323 200312 1 008**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	SALINAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Pembangunan Daerah	Prosesnya Kerja Pembangunan Daerah yang Tercepat	100%

KODE REKEMING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SUMBER UANG
1	2	3	4	5	6	7
8 9 00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 4.475.437.585				
8 9 00 3 01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan	Rp. 4.307.850.799				
8 9 00 3 01 01	- Analisis Kelemb. Daerah, Partisipatif, dan Isi Strategis Pembangunan Daerah	Rp. 3.181.301.045	memerumuskan rencana kerangka Daerah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah di dalam kerangka Rencana Aksi Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal BUKU/RAPO (Rencana Kabupaten, JIS, RPJMD, RMA, Rancangan Teknokratik)	Dokumen	DAU
8 9 00 3 01 04	- Koordinasi Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Litbang Perangkat Daerah	Rp. 20.000.000	Tetapaknya Forum Perangkat Daerah/Litbang Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Litbang Perangkat Daerah	Berita Acara	DAU
8 9 00 3 01 02	- Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota	Rp. 404.538.200	Tetapaknya Musyawarah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musyawarah Kabupaten/Kota	Berita Acara	DAU
8 9 00 3 01 08	- Penyusunan Rencana Kerja/Strategi Musyawarah Kecamatan	Rp. 430.100.700	Tetapaknya Musyawarah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musyawarah Kabupaten/Kota	Berita Acara	DAU
8 9 00 3 01 07	- Koordinasi Penyusunan dan Revisi dan Dit. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 339.434.800	Tetapaknya Musyawarah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musyawarah Kabupaten/Kota	Berita Acara	DAU
8 9 00 3 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 400.000.000				
8 9 00 3 02 01	- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Rp. 400.000.000	Terselenggaranya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Perencanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	DAU
8 9 00 3 04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp. 47.779.629				
8 9 00 3 04 01	- Penguatan dan pengembangan sistem informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp. 47.779.629	Terselenggaranya Runding Desa Menuju Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang Dilaksanakan Pemertanian Data dan Informasi	Desa	DAU
8 9 00 3 05	Regenditerasi, Evaluasi dan Penerapan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.488.715.010				
8 9 00 3 05 01	- Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp. 338.300.000	Tetapaknya Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	DAU
8 9 00 3 05 00	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.400.395.010	Terselenggaranya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	DAU

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE


SAMUDRO TAHIRA, S.Hut
NIK. 19710106 198712 1 001

MERAUKE, 18 Januari 2023
KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN MERAUKE


M. S. SALAFUSE, S.Sos, MP
NIK. 19800223 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANIK YUNYANTI,S.Sos**

NIP : 19740529 200501 2 010

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP**

NIP : 19800323 200312 1 008

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**


ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP
NIP. 19800323 200312 1 008

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BIDANG
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN**


ANIK YUNYANTI,S.Sos
NIP. 19740529 200501 2 010

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
RAGU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	INDIKATOR STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keefektifan Kinerja Pembangunan Daerah yang Terencana	100%

NO	KODE REFERENSI	INDIKATOR HASIL	INDUKSI	KINERJA SUB INDIKATOR	INDIKATOR HASIL SUB INDIKATOR	SATUAN	BEBERES CORUS
1	01	PROGNOSE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.687.422.000				
2	01	Pengembangan, Evaluasi dan Pengawasan Rincian Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.687.422.000				
3	01	Kontribusi Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Merauke	Rp. 200.000.000	Terselenggaranya Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Merauke	Angka Laporan Hasil Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100000	100%
4	01	TRUJUKING, Evaluasi dan Pengawasan Laporan Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.487.422.000	Terselenggaranya Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Angka Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100000	100%

RAGU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERAUKE


KABUPATEN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
RAGU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERAUKE




PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **HENDRA, ST**
NIP : 19790119 201104 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nama : **ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP**
NIP : 19800323 200312 1 008
Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP
NIP. 19800323 200312 1 008

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN PENDANAAN**

HENDRA, ST
NIP. 19790119 201104 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTINUS MAHUSE, S.Pd**
NIP : 19820108 201104 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP**
NIP : 19800323 200312 1 008
Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**ANCELINA BALAGAISE S.Sos, MP
NIP. 19800323 200312 1 008**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BIDANG ANALISIS DATA DAN
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH**

**MARTINUS MAHUSE, S.Pd
NIP. 19750818 200801 2 017**

**PERJALANAN KERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

NO	SALINAN 8 THE 1998	WOLU/OKSERA	TARGET
1	1	1	1
	Strategis/Kualitas Pelayanan, Peningkatan/Perbaikan dan Efektifitas/Keberhasilan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang Tersebut	100%

KODE REKREKSI	PROGRAM / KEGIATAN	ANGKARAN	INDUKSI SUB KEGIATAN	INDUKSI SUB KEGIATAN	JALURNYA	SUMBER DANA
A 1 01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	Rp. 473.871.750				
F 1 1 01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah/Strategis/Partisipasi Pembangunan Daerah	Rp. 466.000.181				
F 1 1 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Rp. 460.000.181	Penelitian/Analisis/Informasi/Perencanaan Pembangunan Daerah	Aktivitas/Operasi/Manajemen/Informasi/Perencanaan/Operasi/Perencanaan/Operasi/Perencanaan/Operasi	Operasi	DAL
A 1 03	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Manajemen Pemerintahan Daerah	Rp. 47.718.498				
A 1 04	Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Manajemen Pemerintahan Daerah	Rp. 47.718.498	Perencanaan/Operasi/Manajemen/Informasi/Perencanaan/Operasi/Perencanaan/Operasi	Aktivitas/Operasi/Manajemen/Informasi/Perencanaan/Operasi/Perencanaan/Operasi	Operasi	DAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERJALANAN KERJA
KABUPATEN MERANGIN

 Kepala Subbidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah

BADAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

 Kepala Subbidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NELY WASNI BONTONG, SP**
NIP : 19730926 20011 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut**
NIP : 19710306 199712 1 001
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 12 Januari 2023

PIHAK KEDUA

**KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN MERAUKE**

SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut
NIP. 19710306 199712 1 001

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

NELY WASNI BONTONG, SP
NIP. 19730926 20011 2 003

**PERJALANAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

NO	BAGIAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Keunggulan Perekonomian daerah melalui peningkatan investasi	Persentase Pemukiman khusus Permodal Daerah	70%

NO	KODE KENDARA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KAMPAI SUB INDIKATOR	MENYUKUN SUB INDIKATOR	SAJUTAMA	SUMBER DATA
4	4.01.01	Manajemen Risiko, dan dan Peningkatan Daerah	Rp. 2.881.717.000				
4	4.01.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Permodalan dan Pengolahan Perikanan	Rp. 448.700.000				
5	5.01.01.1.01.01	Investigasi Data Kelangkaan dan Perikanan	Rp. 200.700.000	Terdapatnya Data Kelangkaan dan Perikanan di Kabupaten Merangin	Jumlah Data Kelangkaan dan Perikanan yang Terdapat di Kabupaten Merangin	Laporan	80%
5	5.01.01.1.01.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Permodalan dan Perikanan	Rp. 1.773.000.000				
5	5.01.02.1.01.01	Penelitian dan Pengembangan Permodalan, Perikanan dan Perikanan	Rp. 1.027.440.000	Terdapatnya Penelitian dan Pengembangan Permodalan, Perikanan dan Perikanan	Jumlah Laporan atau Penelitian dan Pengembangan Permodalan, Perikanan dan Perikanan	Laporan	80%
5	5.01.02.1.01.02	Pengembangan Permodalan dan Perikanan	Rp. 800.470.000				
5	5.01.02.1.01.03	Desain dan Pelaksanaan RENCANA Pengembangan Permodalan Daerah yang Berbasis Inovasi	Rp. 300.700.000	Terdapatnya Desain dan Pelaksanaan RENCANA Pengembangan Permodalan Daerah yang Berbasis Inovasi	Jumlah Laporan atau Pelaksanaan RENCANA Pengembangan Permodalan Daerah yang Berbasis Inovasi	Laporan	80%
5	5.01.02.1.01.04	Penelitian dan Pengembangan Permodalan	Rp. 200.000.000	Terdapatnya Penelitian dan Pengembangan Permodalan	Jumlah Laporan atau Penelitian dan Pengembangan Permodalan	Laporan	80%

BERHIMPUN UTMANG
KABUPATEN MERANGIN



RUMAH SAKIT MERANGIN, SAKIT
JALAN MERANGIN I 131

KABUPATEN MERANGIN
SATUAN PELAKSANA PEMERINTAH DAERAH



MELIPUTI KANTOR, P
JALAN MERANGIN I 131



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VIRGIL YEG YOLMEN, S.IP**
NIP : 19800922 200112 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NELY WASNI BONTONG,SP**
NIP : 19730926 200112 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
**KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

NELY WASNI BONTONG,SP
NIP. 19730926 200112 2 003

PIHAK PERTAMA
**KEPALA SUB BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN
PERATURAN**

VIRGIL YEG YOLMEN, S.IP
NIP. 19800922 200112 1 003

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGHAJIAN PERATURAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERANGIN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDUKTOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pemasaran Produk Daerah dan Produk Industri Pemanggang Daerah	Proses dan Penjualan Produk Pemanggang Daerah	100

KODE REVENUE			PROGRAM / SUBPROGRAM	ANGKARAN	INSTRUMEN KEGIATAN	KELOMPOK SUB KELOMPOK	SAFAS	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	0	99	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.				
6	0	99	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Rp.	181.845.000		
6	0	99	01	01	Pengembangan Data dan Informasi dan Penelitian	Rp.	181.785.000	
						Saluran Dana Hibah dan Bantuan Lain	Saluran Dana Hibah dan Bantuan Lain	DAU

KEPALA SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGHAJIAN PERATURAN
KABUPATEN MERANGIN



KEPALA SUB BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PENGHAJIAN PERATURAN

KELOMPOK PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGHAJIAN PERATURAN
KABUPATEN MERANGIN



KELOMPOK PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PENGHAJIAN PERATURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax: (0971) 322009/326410

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NASARUDDIN, SE**
NIP : 19760926 200312 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NELY WASNI BONTONG, SP**
NIP : 19730926 200112 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
**KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

NELY WASNI BONTONG, SP
NIP. 19730926 200112 2 003

PIHAK PERTAMA
**KEPALA SUB BIDANG KEPENDUDUKAN,
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

NASARUDDIN, SE
NIP. 19760926 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
PADA BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	SARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	TARGET
1	Meningkatkan Hasil-Hasilnya dalam bentuk pelaksanaan tugas	Persentase Penyelesaian Tugas Pelaksanaan	100

KODE BERSAMA		PROGRAM / KEGIATAN	BUDGET	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SUB KINERJA	JIKA	BUNDA TANG
4	0	01		PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp		
4	0	01	001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.171.448.000		
5	0	02	001	Penelitian dan Pengembangan Penelitian, Penelitian dan Pengembangan	1.171.448.000	Teknikal yang Melaksanakan Pengembangan Penelitian, Penelitian dan Pengembangan	100% Ditunjuk 100%

BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MERAUKE



BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MERAUKE

KEPALA SUB BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MERAUKE



KEPALA SUB BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MERAUKE



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Jln. TMP Trikora Telp/Fax : (0971) 322009/326410

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGRIARSO WAHYU SEPTIAWAN,ST**
NIP : 19830924 201104 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Merauke
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NELY WASNI BONTONG,SP**
NIP : 19730926 200112 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Merauke
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Selaku atasan pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 19 Januari 2023

PIHAK KEDUA
**KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

NELY WASNI BONTONG,SP
NIP. 19730926 200112 2 003

PIHAK PERTAMA
**KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI**

AGRIARSO WAHYU SEPTIAWAN,ST
NIP. 19830924 201104 1 002

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERAUKE**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR HASIL	TARGET
1	Walaupun Daerah Tingkat Daerah Masih Masih Berkembang Daerah	Pelayanan Pelayanan Inovasi Inovasi Daerah	10%

KODE BUDGET	PROGRAM / SUBPROGRAM	ANGGARAN	INDUKSI SUB KEGIATAN	INDUKSI SUB KEGIATAN	AUTOMI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
8 0 99	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. -				
8 0 20 124	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 99.471.000				
8 0 20 124 01	Kelembagaan, yaitu: Program dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Inovasi	Rp. 822.759.000	1. Meningkatkan Kualitas Jasa, Kualitas dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Inovasi	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Inovasi	100%	DAD
8 0 20 124 01	Kelembagaan, yaitu: Program dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Inovasi	Rp. 391.850.000	1. Meningkatkan Kualitas Jasa, Kualitas dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Inovasi	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berorientasi Inovasi	100%	DAD

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
 INOVASI DAN TEKNOLOGI

 NIP. 1960094 01034 1 001

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
 INOVASI DAN TEKNOLOGI

 NIP. 1960094 01034 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sbb :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja dan Predikat

NOMOR	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	$91 \geq$	Sangat Berhasil
2	$76 \geq 90$	Berhasil
3	$66 \geq 75$	Cukup Berhasil
4	$51 \geq 65$	Kurang Berhasil
5	$0 \geq 50$	Tidak Berhasil

B. Capaian Indikator Kinerja OPD

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2023

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Bappedalitbang
Kabupaten Merauke Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Target Tahun 2026	Capaian s/d Tahun 2021 Terhadap 2026 (%)
					Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Bappedalitbang	Predikatnya adalah mengacu pada hasil penilaian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Permen PAN RB No. 12 Tahun 2015) Berikut : >90-100: AA/Sangat Memuaskan; >80-	Skor	B	BB	0	0	A	

		90: A/Memuaskan; >70-80: BB Sangat Baik; >60- 70: B/Baik; >50- 60: CC/Cukup (Memadai); >30- 50: C/Kurang; dan 0-30: D/Sangat Kurang							
Meningkatnya Penerapan Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan	Indeks Inovasi Daerah	Kategori pemerintah daerah dalam inovasi (Kemendagri)	Kategori	12,50	35	47,93	136,49	55	87,14

Tabel 3.3.
Pengukuran Indikator Kinerja Bappedalitbang
Kabupaten Merauke Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2023		Capaian Kinerja %	Predikat
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang tercapai	Skala Nilai Peringkat Kinerja Tabel T-E.1. Permendagri 86 Tahun 2017	%	100	66,67	66,67	Cukup Berhasil
Meningkatnya Penerapan Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan inovasi perangkat daerah	(Jumlah inovasi perangkat daerah tahun n ditambah jumlah inovasi perangkat daerah tahun n-1) dibagi seluruh jumlah perangkat daerah di kali 100	%	10	13	130	Sangat Berhasil

Dari hasil capaian kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa predikat capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu **98,33 %** dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1 (IKU KABUPATEN) “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah” terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang hampir mencapai target 100 persen yaitu indikator kinerja “100%” pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 100% persen dan berhasil terealisasi sebesar 100% persen sehingga capaian kerjanya sebesar 100 % dengan predikat “Sangat berhasil”. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 sebesar 98,86 persen maka capaian target di tahun 2023 sebesar 66,67 persen mengalami penurunan 32,19.%. Seperti terlihat dalam tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR	SATUAN	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang tercapai	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	96,87	96,87	100	100	100
Nilai SAKIP BAPPEDALITBANG	Skor	B	B	100	BB	0	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				98,86	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN		66,67

Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja “Nilai SAKIP BAPPEDALITBANG” adalah sebagai berikut :

- Tidak di reviu nya SAKIP Bappedalitbang TA 2023 oleh APIP dikarenakan adanya kesalahan administrasi yang menyebabkan tidak keluarnya nilai SAKIP Bappedalitbang

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala sebagai berikut :

- Lebih tertib dalam administrasi antara APIP dan Bappedalitbang dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi kedua belah pihak

Sasaran 1 Bappedalitbang pada IKU Kabupaten Merauke didukung melalui 3 (tiga) program kegiatan sebagai berikut :

a. Program sasaran Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan;
- Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Kegiatan Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah;
- Kegiatan pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Program tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.876.931.095 Terealisasi sebesar Rp. 6.476.628.353 Atau 92,09 %.

b. Program sasaran Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah:

- Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA.;
- Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahaan;

Program tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.413.317.650 Terealisasi sebesar Rp. 2.665.072.146 Atau 78,08%

- c. Program sasaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
- Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.;
 - Kegiatan Adminisrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Kegiatan Penyediaan jasa urusan pemerintah daerah
 - Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah ;

Program tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11. 508.903.201 Terealisasi sebesar Rp. 9. 620.863.120 Atau 83,59 %.

2. Sasaran 2 (IKU KABUPATEN) “Meningkatnya Penerapan Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan” terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang hampir mencapai target 130 persen yaitu indikator kinerja “Persentase Peningkatan inovasi perangkat daerah” pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 10% persen dan berhasil terealisasi sebesar 13% persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 130 % dengan predikat “Sangat berhasil”. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 sebesar 100,14 persen maka capaian target di tahun 2023 sebesar 130 persen mengalami kenaikan 29,85.%. Seperti terlihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR	SATUAN	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan inovasi perangkat daerah	%	61,45	61,54	100,14	10	13	130
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				100,14	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN		130

Sasaran 2 ini didukung melalui 1 (SATU) program kegiatan sebagai berikut :

Program sasaran penelitian dan pengembangan daerah :

- Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan;
- Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;

Program tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.711.717.250 Terealisasi sebesar Rp. 2.584.449.070 Atau 95,31 %.

Tidak ada kendala berarti selama program kegiatan berjalan.

D. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi sebesar Rp.24.510.869.196,- dengan realisasi Rp.21.347.012.689 atau 87,09 %.

Pengalokasian Belanja dapat dilihat dalam tabel 3.6 , tabel 3.7 dan tabel 3.8.

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.508.903.201,00	9.620.863.120,00	83,59	1.888.040.081,00
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.376.000,00	67.376.000,00	100	0
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.887.880.018,00	5.925.852.545,00	86,03	962.027.473,00
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.381.000,00	164.925.000,00	75,13	40.456.000,00
1.4.	Administrasi Umum	2.344.211.000,00	1.753.678.383,00	74,81	590.532.617,00

No	Program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Perangkat Daerah				
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.330.000,00	111.330.000,00	100	0
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.510.807.183,00	1.260.037.206,00	83,40	250.769.977,00
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.918.000,00	337.663.986,00	88,41	44.254.014,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.876.931.095,00	6.476.628.353,00	92,09	400.302.742,00
2.1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.458.202.795,00	4.324.087.023,00	98,04	134.115.772,00
2.2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	481.593.161,00	388.275.941,00	80,62	93.317.220,00
2.3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Daerah	1.815.356.510,00	1.643.486.760,00	90,53	171.869.750,00
2.4.	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah	121.778.629,00	120.778.629,00	99,18	1.000.000,00

3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.413.317.650,00	2.665.072.146,00	78,08	748.245.504,00
3.1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.934.209.850,00	1.393.335.186,00	72,04	540.874.664,00
3.2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	794.570.300,00	640.019.480,00	80,55	154.550.820,00
3.3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	684.537.500,00	631.717.480,00	92,28	52.820.020,00
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.711.717.250,00	2.584.449.070,00	95,31	127.268.180,00
4.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan	440.796.000,00	417.672.840,00	94,75	23.123.160,00
4.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.371.446.250,00	1.303.598.380,00	95,05	67.847.870,00
4.1.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	899.475.000,00	863.177.850,00	95,96	36.297.150,00
TOTAL		24.510.869.196,00	21.347.012.689,00	87,09	3.163.856.507,00

Tabel 3.7
Rincian Belanja Langsung Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA DAERAH	24.510.869.196	21.347.012.689	87,09
2	Belanja Operasi	24.387.457.696	20.513.526.511	84,12
	Belanja Pegawai	6.772.080.018	5.784.122.545	85,41
	Belanja Barang/Jasa	17.615.377.678	15.439.822.894	87,65
3	Belanja Modal	123.411.500	123.067.250	99,72
4	Belanja Tak Terduga	0	0	0
5	Belanja Transfer	0	0	0

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Keuangan
Per Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Anggaran			Program
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	11.508.903.201,00	9.620.863.120,00	83,59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.		6.876.931.095,00	6.476.628.353,00	92,09	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3.		3.413.317.650,00	2.665.072.146,00	78,08	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Inovatif	2.711.717.250,00	2.584.449.070,00	95,31	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
TOTAL		24.510.869.196,00	21.347.012.689,00	87,09	

BAB IV

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan perencanaan dan koordinasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan daerah beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pencapaian sasaran masih ada yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh mekanisme secara umum dari penyelenggaraan perencanaan.

Secara umum Bappedalitbang telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan atau dituangkan dalam visi dan tujuan serta sasaran pada Rencana Kinerja Tahunan Bappedalitbang Kabupaten Merauke Tahun 2023 dapat dicapai dengan target 98,33 %

Pencapaian target indikator kinerja Bappedalitbang pada tahun 2023 yaitu 98,33 %, ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh **komitmen**, **keterlibatan** dan **dukungan** aktif segenap komponen aparatur Bappedalitbang sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini masih ada permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan dan perlu ditindaklanjuti pada tahun-tahun mendatang.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, merupakan suatu koreksi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2023, maka diharapkan kedepan tingkat koordinasi lebih ditingkatkan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Litbang Kabupaten Merauke tahun 2023 dapat menjadi bahan informasi dan dapat dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merauke, 23 Januari 2024

KEPALA BADAN,

SAMUELERINO TAHIYA, S.Hut
PEMBINA TK. I
NIP. 19710306 199712 1 001